

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian dan Peran UKM

Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya adalah Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM), Badan Pusat Statistik (BPS). Keputusan 28 Menteri Keuangan No.316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan UU No. 20 Tahun 2008. Definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

- 1) Menurut Kementerian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), adalah entitas usaha yang mempunyai memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000. sampai Rp. 2.500.000.000. sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 500.000.000 s.d. Rp. 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.
- 2) Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kualitas tenaga kerja Usaha Kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s/d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.

- 3) Berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil di definisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp. 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang di tempati) terdiri dari : 1). Bidang usaha peseroan firma (Fa), persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas (PT), dan koperasi. 2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).
- 4) Pada tanggal 4 Juli 2008 telah ditetapkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi UKM yang disampaikan oleh Undang-undang ini juga berbeda dengan definisi di atas. Menurut UU No. 20 Tahun 2008 ini, yang disebut dengan Usaha Kecil adalah entitas yang memiliki kriteria sebagai berikut :(1) kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat menyimpulkan bahwa definisi Usaha Kecil menengah (UKM) adalah usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih Rp. 50 juta sampai paling banyak Rp. 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan paling banyak Rp. 2,5 miliar. Sedangkan usaha menengah adalah

usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan paling banyak Rp. 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 miliar sampai dengan paling banyak Rp. 50 miliar.

A. Klasifikasi UKM

Suatu komite untuk pengembangan ekonomi mengajukan konsep tentang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dengan lebih menekankan pada kualitas atau mutu dari pada kriteria kuantitatif untuk membedakan perusahaan usaha kecil menengah dan besar. Ada empat aspek yang dipergunakan dalam konsep UKM tersebut, yaitu pertama, kepemilikan, kedua operasinya terbatas pada lingkungan atau kumpulan pemodal; ketiga, wilayah operasinya terbatas pada lingkungan sekitar, meskipun pemasaran dapat melampaui wilayah lokalnya; keempat, ukuran dari perusahaan lainnya dalam bidang usaha yang sama. Ukuran yang dimaksud bisa jumlah pekerjaan atau karyawan atau satuan lainnya yang signifikan (Partom dan Soejodono, 2004).

Menurut Rahmana (2009), UKM dapat diklasifikasi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:

1) *Livelihood activities*, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.

2) *Micro Dynamic Enterprice*, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan sub kontak dan ekspor.

B. Peran UKM

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terstruktur dengan arah produktivitas dan daya saing adalah tujuan dan peran UKM dalam menumbuhkan wirausahawan yang tangguh. Secara umum UKM dalam perekonomian nasional memiliki peran:

- 1) Sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi
- 2) Penyedia lapangan kerja terbatas
- 3) Pemain penting dalam pengembangan perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta kontribusinya terhadap neraca pembayaran (Departemen Koperasi,2008).

Karakteristik UKM ini, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh AKATIGA, *The Center for Economic and Social Studies (CESS)* pada tahun 2000, adalah mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas UKM dalam melakukan penyesuaian proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi dan tidak terlalu terlibat dalam hal birokrasi.

2.1.2 Tenaga Kerja

a. Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga Kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu wilayah yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan (Statistik UKM 2012:2), Mulyadi.s (2003).

Berdasarkan BPS, pekerja atau tenaga kerja adalah semua orang yang biasanya bekerja di perusahaan/usaha tersebut, baik berkaitan dengan produksi maupun administrasi. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Indonesia dipilih batas umur minimal 10 tahun berdasarkan kenyataan bahwa pada umur tersebut sudah banyak penduduk yang bekerja karena sulitnya ekonomi keluarga mereka. Indonesia, tidak menganut batas umur maksimal karena wilayahnya belum memiliki jaminan sosial nasional. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia

yang memiliki tunjangan di hari tua yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai perusahaan swasta. Untuk golongan ini pun, pendapatan yang mereka terima tidak mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh sebab itu

mereka yang telah mencapai usaha pensiun biasanya tetap masih harus bekerja sehingga mereka tetap di golongan sebagai tenaga kerja.

Menurut Sumarsono (2009:3), tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia untuk sanggup bekerja. Pengertian tenaga kerja ini meliputi mereka yang bekerja untuk diri sendiri ataupun anggota keluarga yang tidak menerima bayaran berupa upah atau mereka yang sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja, dalam arti mereka menganggur dengan terpaksa karena tidak ada kesempatan kerja. Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah bekerja, sedang mencari pekerjaan dan yang melakukan pekerjaan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.

b. Permintaan Tenaga kerja

Menurut Aris Ananta (1993:39) dalam Zamrowi (2007), bahwa permintaan tenaga kerja merupakan sebuah daftar berbagai alternatif kombinasi tenaga kerja dengan input lainnya yang tersedia yang berhubungan dengan tingkat gaji. Sedangkan menurut Arfida BR, (2003) dalam Pratama (2012), permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya permintaan akan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi. (Badan Pusat Statistik, 2010).

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang di butuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu, permintaan tenaga kerja ini di pengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi, antara lain: naik turunnya permintaan

pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan, tercermin melalui besarnya volume produksi, dan harga barang-barang modal yaitu nilai mesin atau alat yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan jumlah tenaga kerja yang diminta adalah lebih ditujukan pada kuantitas dan banyaknya permintaan tenaga kerja pada tingkat upah tertentu.

Menurut pandangan mazhab klasik, perekonomian pada umumnya akan selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh, menurut ahli-ahli ekonomi klasik pengangguran tenaga kerja merupakan keadaan yang berlaku secara sementara saja. Pandangan ini didasarkan kepada dua keyakinan yaitu; (i) fleksibilitas suku bunga dan tingkat harga akan menyebabkan keseimbangan di antara penawaran dan permintaan agregat sehingga penggunaan tenaga kerja penuh, (ii) fleksibilitas tingkat upah mewujudkan keadaan dimana permintaan dan penawaran tenaga kerja mencapai keseimbangan pada penggunaan tenaga kerja penuh (Sadono Sukirno, 2004:70).

Pandangan teori klasik tersebut dibantahkan oleh Keynes, Keynes berpendapat bahwa pengangguran tenaga kerja penuh adalah keadaan yang terjadi, dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang menjadi wujud perekonomian. Pandangan ini mengacu kepada dua hal berikut; (i) faktor-faktor yang menentukan tingkat tabungan, tingkat investasi dan suku bunga dalam perekonomian (ii) sifat-sifat perkaitan di antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh pengusaha (Sadono Sukirno, 2004:80).

Teori lain tentang permintaan tenaga kerja diturunkan dari fungsi produksi suatu aktivitas ekonomi. Produksi merupakan transformasi dari input atau

masukannya (faktor produksi) ke dalam output atau keluaran. Mankiw (2003:49) mengasumsikan bahwa suatu proses produksi hanya menggunakan dua jenis faktor produksi yaitu tenaga kerja (L) dan modal (K),

c. Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut Todaro (2003: 307) dalam Karib (2012), penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh pencari kerja.

Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu unit usaha atau lapangan pekerjaan. Penyerapan tenaga kerja ini akan menampung semua tenaga kerja apabila unit usaha atau lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang ada. Adapun lapangan pekerjaan adalah bidang kegiatan usaha atau instansi dimana seseorang bekerja atau pernah bekerja (BPS, 2003).

Pasar tenaga kerja di Kota Bandung dapat dibedakan atas sektor formal dan informal. Sektor formal mencakup perusahaan yang mempunyai status hukum, pengakuan dan izin resmi serta dengan kegiatan usaha umumnya sederhana, skala usaha relative kecil, umumnya sektor informal tidak berbadan hukum, usaha sektor informal sangat beragam. Dalam hal ini UKM merupakan salah satu indikasi dari sektor informal (Raselalwati, 2011:44).

Penyerapan tenaga kerja menjelaskan tentang hubungan kuantitas penyerapan tenaga kerja yang dihendaki dengan tingkat upah. Adanya

pertambahan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang di produksi (Simanjuntak,2011).

d. Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan pengusaha atas tenaga kerja berlainan dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Perusahaan memperkerjakan seseorang karena orang tersebut membantu memproduksi barang dan jasa untuk dijual kepada masyarakat konsumen. Dengan kata lain, pertambahan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja bergantung pertambahan permintaan masyarakat akan barang dan jasa yang diproduksi. Permintaan tenaga kerja yang seperti itu dinamakan *derived demand* (Sumarsono, 2009:18). Pengusaha memperkerjakan seseorang karena membantu memproduksi barang/jasa untuk dijual kepada konsumen. Oleh karena itu, kenaikan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja, tergantung dari kenaikan permintaan masyarakat akan barang yang diproduksi.

Menurut Sumarsono (2009:12), permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya permintaan akan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh instansi tertentu. Biasanya permintaan akan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil.

Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh:

- a. Perubahan tingkat upah
- b. Perubahan permintaan hasil akhir produksi oleh konsumen
- c. Harga barang modal turun

2.1.3. Modal

A. Pengertian Modal

Modal memang perlu untuk dipelajari, apalagi bagi anda yang akan terjun di dunia ekonomi dan bisnis. Seperti kita ketahui, istilah modal sangat identik dengan dunia ekonomi dan bisnis. Inti dasar dari suatu perusahaan dapat menjalankan kegiatan usahanya adalah dengan adanya modal. Modal merupakan faktor produksi terpenting. Bagi perusahaan yang baru berdiri modal digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha dan memperluas pangsa pasar. Besar kecilnya modal memang dipengaruhi oleh besar kecilnya usaha yang akan dibuat. Ada banyak orang berpendapat bahwa modal tidak selalu berupa uang, modal bisa keinginan, niat, keahlian, motivasi, dan hal-hal pendukung dalam menjalankan usaha.

Menurut Alam S. Modal adalah segala sumber daya hasil produksi yang tahan lama, yang dapat digunakan sebagai input produktif dalam proses produksi berikutnya.

Menurut Prof. Baker, Modal diartikan baik berupa barang-barang konkret yang masih ada dalam rumah tangga perusahaan yang terdapat di neraca sebelah debit, maupun berupa daya beli atau nilai tukar dari barang-barang itu yang tercatat di sebelah kredit

Menurut Bambang Riyanto, Modal adalah hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut. Dalam perkembangannya kemudian modal ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal.

Menurut Soetanto Hadianto, Modal adalah dana yang berasal dari pemilik, bank, atau pemegang saham ditambah dengan agio saham dan hasil usaha yang berasal dari kegiatan usaha bank.

B. Jenis Pengertian Modal:

1. Modal Abstrak – Konkrit, suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu adalah relatif permanen, sedangkan modal konkrit/ capital goods mengalami perubahan atau pergantian.

2. Modal Aktif – Pasif adalah modal yang tertera disebelah debet dari neraca yang menggambarkan bentuk-bentuk dimana seluruh dana yang diperoleh perusahaan diutamakan. Sedangkan modal pasif adalah modal yang tertera disebelah kredit dari neraca yang menggambarkan sumber-sumber dimana dana yang diperoleh.

C. Sumber Modal

Pada dasarnya sumber modal dapat ditinjau dari asalnya, sumber modal dapat dibedakan menjadi sumber dana intern (internal sources) dan sumber ektern (external souces). Yang pengertiannya adalah:

1) Sumber Intern

Modal yang berasal dari sumber intern adlaah modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri didalam perusahaan. Menurut Ching F Lee dan Joseph E. Finnerty dalam bukunya “Courporate, Theory, Method, and Aplications” kebutuhan dana didapat dari:

- Dana internal melibatkan tingkat arus kas dari penghasilan dan penyusunan beban ditahan dihasilkan oleh perusahaan (1990: 395).

- Cara pembelanjaan dana juga sering disebut pembelanjaan dalam perusahaan atau internal financing. Sumber modal intern ini berupa keuntungan yang ditahan (retained net profit) dan diakumulasi dari penyusutan barang-barang yang terkait dengan jalannya usaha (accumulated depreciations).

Jadi intinya adalah setiap perusahaan wajib menahan beberapa keuntungan dari usahanya untuk mengganti dana penyusutan barang-barang yang mereka gunakan dalam produksi atau dalam menjalankan usaha.

2) Sumber Modal Ekstern

Sumber ektern adalah sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Masih menurut Changn F. Lee dan Joseph E Finnerty selain dari internal financing juga didapat dari external financing yang pengertiannya adalah:

- Penawaran pembiayaan eksternal dengan jumlah yang baru jangka panjang dan jangka pendek detekuitas baru yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai sumber dana (1990:395).
- Cara pembelanjaan dalam uoaya pemenuhan kebutuhan dalam usaha ini, sering juga disebut pembelanjaan dari luar perusahaan atau eksternal financing. Dana yang berasal dari sumber eksternal adalah dana para kreditur ataupun pemilik.

2.1.4. Jumlah Unit Usaha

Badan Pusat Statistik mendefinisikan unit usaha adalah unit yang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga

maupun suatu badan dan mempunyai kewenangan yang ditentukan berdasarkan kebenaran lokasi bangunan fisik, dan wilayah operasinya.

Secara umum pertumbuhan unit usaha suatu sektor dalam hal ini industri kecil pada suatu daerah akan menambah jumlah lapangan pekerjaan. Hal ini berarti permintaan tenaga kerja juga bertambah. Menurut Prabowo (dalam Lestari, 2011:42), jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap permintaan tenaga kerja, artinya jika unit usaha suatu industri ditambah maka peran tenaga kerja juga bertambah. Semakin banyak jumlah perusahaan atau unit usaha yang berdiri maka akan semakin banyak jumlah perusahaan atau unit usaha yang berdiri maka akan semakin banyak untuk terjadi penambahan tenaga kerja.

Dengan adanya peningkatan modal pada suatu industri, juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan dengan adanya peningkatan investasi maka akan meningkatkan jumlah perusahaan yang ada pada industri tersebut. Peningkatan jumlah perusahaan maka akan meningkatkan jumlah output yang akan dihasilkan sehingga lapangan pekerjaan meningkat dapat dihasilkan. Sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan akan mengurangi pengangguran atau dengan kata lain akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dapat diketahui juga bahwa, jumlah unit usaha erat dengan penyerapan tenaga kerja pada sektor industri dilihat dari terus meningkatnya jumlah usaha. Menurut Matz (2003) dalam Wicaksono (2010).

Unit usaha merupakan unit yang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan dan mempunyai kewenangan yang ditentukan berdasarkan kebenaran lokasi bangunan fisik, dan

wilayah operasinya. Sedangkan, perusahaan atau unit usaha industri adalah suatu kesatuan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau yang lebih bertanggung jawab atas usaha tersebut. Untuk pengaruhnya terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil menurut Aditya (2004), pertumbuhan unit usaha suatu sektor dalam hal ini sektor industri di suatu daerah secara signifikan akan menambah jumlah lapangan pekerjaan di suatu daerah.

2.1.5 Aset

Pengertian aset secara umum adalah barang (*Thing*) atau sesuatu barang (*anything*) yang mempunyai nilai ekonomi (*economic value*), nilai komersial (*commercial value*) atau nilai tukar (*exchange value*) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau individu (perorangan). Jadi *real properti* merupakan kumpulan atas berbagai macam hak dan *interest* yang ada dikarenakan kepemilikan atas satuan *real estate*, meliputi hak untuk menggunakan, menyewakan, memberikan kepada orang lain atau tidak. Properti selain sebagai investasi, juga merupakan aset. Pengertian aset adalah sesuatu yang memiliki nilai. Menurut Siregar (2001) pengertian aset bila dikaitkan dengan properti maka dapat dijabarkan melalui beberapa aspek, antara lain (Sulistiwati, 2003:16).

- 1) Memiliki nilai ekonomis yang terkait dengan pemanfaatan tertinggi dan terbaik (*highest and best use*)
- 2) Menghasilkan pendapatan dari pengoperasian properti

- 3) Memiliki fisik, fungsi dan hak penguasaan yang baik
- 4) Economical *life-time* yang panjang.

Menurut Dr. A Sugiama (2013) Aset adalah ilmu untuk memandu pengolahan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset mendapatkan, menginvestasi, melakukan legal audit menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien.

Menurut Siregar (2004) Aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer di lingkungan pemerintah maupun di satuan kerja atau instansi.

A. Kategori Aset

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pernyataan nomor 62 aset dikategorikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Dalam pernyataan 66 disebutkan aset tetap meliputi tanah, peralatan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Persediaan adalah barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Barang persediaan adalah barang milik daerah yang termasuk barang persediaan adalah barang yang disimpan dalam gudang tertutup maupun terbuka, atau

ditempat penyimpanan lainnya. Lebih lanjut dapat kemukakan beberapa kategori aset menurut Budisusilo (2005:37) yaitu:

- 1) Aset Operasional adalah yang dipergunakan dalam operasional perusahaan/pemerintah yang dipakai secara berkelanjutan dan dipakai pada masa mendatang.
- 2) Aset Non Operasional adalah aset yang tidak merupakan bagian integral dari operasional perusahaan/pemerintah dan diklasifikasi sebagai aset berlebih.
- 3) Aset Infrastruktur adalah aset yang melayani kepentingan publik yang tidak terkait, biaya pengeluaran dari aset ditentukan kontinuitas penggunaan aset bersangkutan, seperti jalan raya, jembatan dan sebagainya.
- 4) *Commonity asset*, sebenarnya adalah aset milik pemerintah dimana penggunaan aset tersebut secara terus menerus, umur ekonomis atau umur gunanya tidak ditetapkan dan terkait pengalihan yang terbatas (tidak dapat dialihkan).

B. Tujuan Inti Aset

Tujuan Aset menurut Sugiarma (2013:16) adalah “untuk pengambilan keputusan yang tepat agar aset yang dikelola berfungsi secara efektif dan efisien”, maka tujuan aset yaitu:

1. Meminimalisir biaya selama umur aset bersangkutan
2. Dapat menghasilkan laba yang maksimum
3. Dapat mencapai penggunaan serta pemanfaatan.

2.1.6 Omset

Seperti kita ketahui, keseluruhan waktu sirkulasi suatu kapital tertentu adalah jumlah dari waktu sirkulasinya itu sendiri dan waktu produksinya. Ia adalah periode waktu yang berlalu dari saat nilai kapital itu dikeluarkan di muka dalam suatu bentuk tertentu sampai kembalinya nilai kapital itu dalam proses dalam bentuk yang sama.

Tujuan khusus produksi kapasitas adalah selalu valorisasi dari nilai yang dikeluarkan di muka, entah nilai ini dikeluarkan di muka di dalam bentuk independennya, yaitu bentuk uang, atau dalam barang dagangan, di dalam kasus bentuk nilainya hanya memiliki suatu kebebasan dalam harga barang dagangan yang dikeluarkan di muka. Sirkuit kapital, manakala ini tidak dianggap sebagai suatu babak tersendiri tetapi sebagai suatu proses periodik, disebut omsetnya. Durasi dari omset ini ditentukan oleh jumlah waktu produksinya dan waktu sirkulasinya. Periode waktu ini merupakan waktu omset kapital. Dengan demikian ia mengukur selang antara satu periode sirkulus dari keseluruhan nilai kapital dan yang berikutnya periodisitas dalam proses hidup kapital atau lebih tepatnya, waktu yang diperlukan bagi pembaruan dan pengulangan proses valorisasi dan produksi dari nilai kapital yang sama.

Jika kita mengabaikan masing-masing kejadian yang dapat mempercepat atau mempersingkat waktu omset suatu kapital individual, waktu omset kapital berbeda-beda menurut lingkungan-lingkungan investasi mereka yang berbeda-beda. Karena hari kerja merupakan satuan ukuran alami bagi fungsi tenaga kerja,

demikian tahun merupakan satuan ukuran alami bagi omset kapital dalam proses. Dasar alami untuk tolok ukur ini adalah bahwa tanaman-tanaman makanan yang paling penting di zona iklim sedang, tanah kelahiran produksi kapasitas, adalah produk-produk setahun.

Jika kita menyebut tahun sebagai satuan ukuran dari waktu omset, U , waktu omset suatu kapital tertentu u , dan jumlah omsetnya n , maka $n = \frac{U}{u}$. Jika waktu omset u adalah tiga bulan, misalnya maka $n = 12/3=4$; kapital itu menyelesaikan empat omset dalam setahun atau berganti (melakukan jual-beli) empat kali. Jika $u = 18$ bulan, maka $n = 12/18 = 2/3$; kapital itu hanya melalui dua pertiga dari waktu omsetnya dalam satu tahun. Bagi kapitalis, waktu omset kapitalnya adalah waktu yang harus dikeluarkan kapitalnya di muka (uang persekot) agar divalorisasi dan bagi dirinya menerimanya kembali dalam bentuk aslinya. Sebelum kita menyelidiki lebih jauh pengaruh omset itu atas proses produksi dan valorisasi, kita harus membahas dua bentuk baru yang diperoleh kapital sebagai suatu akibat proses sirkulasi, dan yang mempengaruhi bentuk omsetnya, (Karl-Mark).

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Abdul Karib (2012)

“Analisis Pengaruh Produksi, Modal dan Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Industri Sumatera Barat”, model yang telah di rumuskan akan di regres untuk mengestimasi persamaan tersebut dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square (OLS)*, dengan menggunakan data sekunder dalam menganalisis yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti Badan

Pusat Statistik (BPS), Dinas perindustrian dan perdagangan Sumatera Barat (Sektor Industri dalam angka 1997-2008).

Hasil analisis data menunjukkan sebagai berikut:

- a. Penyerapan tenaga kerja pada sektor industri Sumatera Barat dipengaruhi oleh variabel nilai produksi, nilai modal dan jumlah unit usaha.
- b. Nilai produksi, nilai modal, dan jumlah unit usaha merupakan faktor yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perubahan jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industri Sumatera Barat tahun 1997-2008.
- c. Variabel produksi merupakan faktor yang cukup menentukan terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industri Sumatera Barat. Variabel produksi memiliki hubungan yang positif dengan tenaga kerja.
- d. Variabel modal merupakan faktor yang cukup menentukan terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industri Sumatera Barat. Variabel modal memiliki hubungan yang positif dengan tenaga kerja.
- e. Variabel jumlah unit usaha merupakan faktor yang sangat menentukan terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor industri Sumatera Barat.

2. Rizky Eka Putra (2012)

“Pengaruh Nilai Modal, Nilai Upah, dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”, variabel penelitian adalah nilai modal, nilai upah, nilai produksi sebagai variabel bebas dan penyerapan tenaga kerja sebagai variabel terikat.

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa secara parsial maupun simultan terdapat pengaruh signifikan antara nilai modal, nilai upah dan nilai produksi

terhadap penyerapan tenaga kerja industri mebel di Kecamatan Pedurungan kota Semarang. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh positif nilai modal, nilai upah dan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri mebel di Kecamatan Pedurungan kota Semarang.

3. Nenek Woyanti dan Ayu Wafi Lestari (2011)

“Pengaruh Jumlah Usaha, Nilai Modal, dan Upah Minimum Terhadap Permintaan tenaga Kerja Pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang”. Model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis regresi berganda. Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Variabel unit usaha, nilai modal, dan upah minimum kabupaten berpengaruh terhadap permintaan tenaga kerja di Kabupaten Semarang.
- b. Variabel jumlah unit usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang.
- c. Variabel nilai modal pada Industri Kecil dan Menengah berpengaruh positif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang.
- d. Variabel Upah Minimum Kabupaten berpengaruh negatif dan signifikan terhadap permintaan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang.
- e. Secara simultan atau bersama-sama variabel unit usaha, nilai modal, dan upah minimum kabupaten mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap permintaan tenaga kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Semarang.

4. Achma Hendra Setiawan (2010)

“Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Semarang”. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square*). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk data runtut waktu (*time series*) selama periode 1993-2007. Data mengenai jumlah tenaga kerja dan UMK diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Semarang, sedangkan data mengenai jumlah unit usaha nilai modal dan nilai output berasal dari Dinas Perindustrian Kota Semarang.

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa jumlah unit usaha nilai modal, nilai output dan upah minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja. Jumlah unit usaha, nilai modal, dan upah minimum kota secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja, sedangkan nilai output tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja. Variabel yang paling berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor UKM di Kota Semarang adalah jumlah unit usaha, sedangkan variabel nilai output memiliki pengaruh yang paling kecil di antara variabel yang lain.

5. The Institute for Manufacturing (IFM) University Of Cambridge (2010)

“*Stimulating Growth and Employment in the UK Economy*”. Penelitian ini di prioritaskan pada bisnis langsung untuk UKM manufaktur, yang bertujuan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi Inggris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan industri Inggris dipengaruhi oleh pengembangan UKM manufaktur yang ada. UKM juga mampu mendorong Pertumbuhan nilai financial (PDRB) dan nilai strategis (pertumbuhan lapangan kerja pengembangan modal intelektual dan pengembangan kemampuan karyawan).

6. Ariyanto (2010)

“Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 1985-2007”. Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk analisis kuantitatif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dengan menggunakan data deret waktu (*time series*) antara tahun 1985-2007. Pencarian data terutama pada berbagai sumber atau instansi yang terkait dengan penelitian ini. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menggunakan ECM (*Error Correction Model*).

Berdasarkan hasil analisis ECM (*Error Correction model*), dapat disimpulkan bahwa: pertama, pertumbuhan PDRB ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Kedua pengeluaran pemerintahan mempunyai pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja Jawa Tengah dalam jangka pendek dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Ketiga, nilai ekspor mempunyai pengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja Jawa Tengah dalam jangka pendek dan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang.

7. Maharani Tejasari (2008)

“Peran Sektor Usaha Kecil dan Menengah dalam Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa PDRB UKM, Modal UKM, Ekspor UKM, Tenaga Kerja UKM, Jumlah UKM, Pendapatan per kapita, Kredit Modal Kerja dan Kredit Modal pada Usaha Kecil (KUK) dari tahun 1996-2006.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah unit usaha (0.904148), Kredit Modal Kerja (0.035586) dan PDRB UKM (0.062321) secara signifikan mempunyai pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan dengan adanya peningkatan jumlah usaha. Kredit Modal Kerja dan pertumbuhan PDRB merupakan salah satu dari penciptaan kesempatan kerja. Sedangkan Kredit Modal Usaha Kecil (-0.074278) secara signifikan berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan kredit ini lebih banyak digunakan yang padat modal sehingga kurang adanya pemberdayaan terhadap sumber daya manusia. Pendapatan per kapita (-0.378047) memberikan pengaruh yang signifikan secara negatif terhadap penyerapan tenaga kerja karena semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita di suatu negara semakin kecil pangsa tenaga kerja UKM tenaga kerja (2.813870) dan modal (0.85055) secara signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan produktivitas tenaga kerja dan modal akan mendorong kenaikan output UKM. Akan tetapi, nilai ekspor tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi karena sumbangan dan kontribusinya yang masih rendah.

Disamping itu, hal tersebut juga dikarenakan kondisi ekspor Indonesia dimana sebagian besar input ekspor masih bergantung pada impor. Sehingga mengakibatkan ekspor tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan PDRB.

8. Reyes Aterido dan Mary Hallward-Driemeier (2007)

“Modal Climate and Employment Growth: The Impact of Access to Finance, Corruption and Regulations Across Firms”. Penelitian ini dilakukan oleh *world bank* dan *inter-American Development bank*. Penelitian ini telah memberikan bukti baru tentang peran modal pada pertumbuhan lapangan kerja. Hasil menunjukkan perbedaan yang signifikan di kategori ukuran perusahaan baik dari segi perbedaan kondisi obyektif yang dihadapi oleh perusahaan dan dalam hal non-linearities dalam dampak dari kondisi tersebut. Rendahnya akses terhadap pembiayaan, korupsi, peraturan bisnis kurang berkembang dan kemacetan infrastruktur pergeseran ke bawah distribusi ukuran kerja. Rendahnya akses terhadap pendanaan dan peraturan bisnis yang efektif mengurangi pertumbuhan semua perusahaan terutama perusahaan-perusahaan mikro dan kecil. Korupsi dan infrastruktur yang buruk membuat kemacetan pertumbuhan untuk perusahaan menengah dan besar. Hasil ini juga memperkuat pentingnya membedakan dampak di kelas ukuran perusahaan yang memungkinkan untuk perusahaan mikro (kurang dari 10 karyawan) menjadi berbeda dari “kecil” perusahaan.

Hasil penelitian ini menegaskan tentang pentingnya akses terhadap pendanaan bagi perusahaan-perusahaan mikro dan kecil. Ini memberikan kontribusi pada pengetahuan yang ada di bidang keuangan di berbagai bidang. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pada pertumbuhan lapangan kerja dari unit

tambahan pembiayaan eksternal tertinggi untuk perusahaan-perusahaan ini. Hal ini juga membandingkan efek dari berbagai bentuk pembiayaan terhadap pertumbuhan lapangan kerja dan menemukan bahwa akses ke modal kerja memiliki efek tertinggi dari semua. Perusahaan mungkin lebih cenderung untuk mengambil pekerjaan tambahan jika mereka mampu membayar upah secara teratur bahkan dalam menghadapi arus kas pasti.

2.3 Kerangka Pemikiran

Pentingnya Penyerapan Tenaga Kerja merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi sektor UKM dalam pertumbuhan perekonomian di Kota Bandung. Lapangan kerja yang diciptakan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan rumah tangga yang memungkinkannya untuk membiayai peningkatan kualitas manusia. Kualitas manusia yang meningkat pada sisi lain akan berdampak pada kualitas tenaga kerja yang pada gilirannya akan mempengaruhi tingkat dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pertumbuhan dapat mempengaruhi ketenagakerjaan dari sisi permintaan (menciptakan lapangan pekerjaan) dan sisi penawaran (meningkatkan kualitas tenaga kerja). Dengan kata lain, secara teoritis, pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja dipengaruhi oleh modal menurut Mulyadi.S (2003).

Variabel Modal berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Faktor yang menunjang dalam proses UKM, bertujuan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas yang lebih tinggi yang akan mengakibatkan surplus

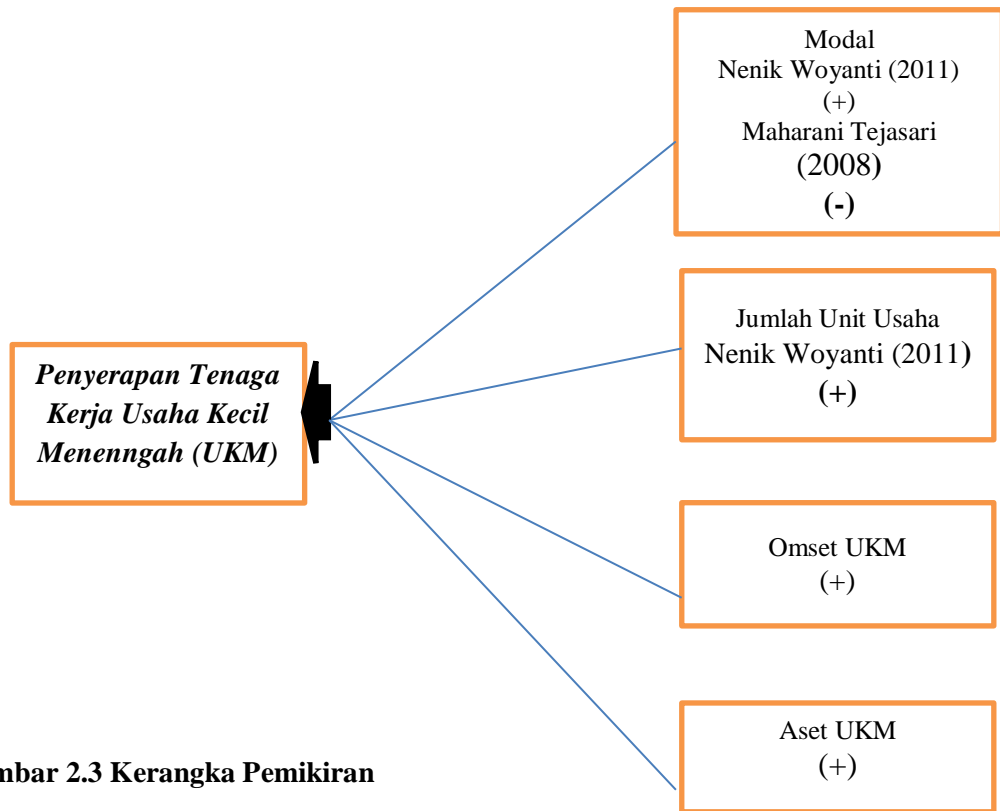
dan lebih besar, sehingga mempengaruhi proses Modal pada sektor yang satu atau yang lainnya. Dengan begitu kesempatan kerja semakin meningkat sehingga mempengaruhi penyerapan tenaga kerja (Karib, 2012:60). Akan tetapi modal dapat berpengaruh negatif apabila kredit usahanya lebih banyak menggunakan padat modal sehingga kurang adanya pemberdayaan terhadap sumber daya manusia, sehingga menyebabkan karena tambahan modalnya lebih banyak menggantungkan terhadap tenaga kerja sebagai nilai substitusi. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat produksi dan mempunyai efek ganda yang akan meningkatkan permintaan tenaga kerja, maka modal memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional, khususnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Abdul karib, 2012).

Variabel Jumlah Unit Usaha berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, merupakan salah satu faktor dalam sektor UKM, dengan adanya peningkatan modal pada sektor UKM, juga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan oleh adanya peningkatan modal maka akan meningkatkan jumlah perusahaan yang ada pada usaha kecil tersebut. Peningkatan jumlah perusahaan maka akan meningkatkan jumlah output yang akan dihasilkan sehingga lapangan pekerjaan meningkat dan akan mengurangi pengangguran atau dengan kata lain akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Nenik Woyanti, 2011).

Variabel Aset berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, merupakan sesuatu yang memiliki nilai. Memiliki nilai ekonomis yang terkait dengan pemanfaatan tertinggi dan terbaik, menghasilkan pendapatan dari

pengoperasian properti, memiliki fisik, fungsi dan hak penguasaan yang baik. Kemudian aset operasional yang digunakan dalam operasional perusahaan/pemerintah yang dipakai secara berkelanjutan dan dipakai pada masa yang akan datang untuk keperluan di sektor UKM terhadap penyerapan tenaga kerja.

Variabel Omset berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi nilai transaksi yang terjadi dalam hitungan waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, bulanan, tahunan. Omset merupakan jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu masa dijual. Hal ini dapat menunjukkan bahwa apabila nilai omset mengalami kenaikan maka usaha UKM akan ikut meningkat, nilai ekspansi usaha juga ikut meningkat, jadi jika nilai omset meningkat maka penyerapan tenaga kerja akan naik.



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah serta uraian kerangka teoritis diatas maka dalam penelitian ini dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga Modal berpengaruh Positif terhadap Penyerapan tenaga kerja di Kota Bandung.
2. Diduga Jumlah Unit Usaha berpengaruh Positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandung.
3. Diduga Aset berpengaruh Positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandung.
4. Diduga Omset berpengaruh Positif terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Bandung.